

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perebutan makna di dalam suatu kebijakan antara pihak satu dengan pihak lain adalah hal yang menarik untuk didalami. Idealnya kebijakan merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun, makna kesejahteraan tersebut dijadikan sebagai wacana untuk bisa melanggengkan semua kebijakan pemerintah yang belum tentu benar-benar memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemerintah seringkali membuat suatu hal nampak nyata dan objektif tatkala ingin mengeluarkan sebuah kebijakan.

Menurut KBBI wacana dipahami sebagai sebuah satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh seperti novel, buku, artikel, pidato, atau khotbah. Secara bahasa wacana berasal dari terjemahan *discourse* yang merupakan serapan dari bahasa latin yaitu *discursus* yang artinya adalah lari ke sana ke mari. Menurut Setiawati & Rusmawati (2019) istilah wacana adalah sebuah hal yang berhubungan dengan kata-kata, komunikasi, dan ungkapan baik secara lisan maupun tulis. Pada sisi lain menurut Junaiyah & Arifin (2010) wacana merupakan wujud bahasa atau bentuk bahasa yang bersifat komunikatif, interpretatif, dan kontekstual. Di dalam konteks politik menurut Ardianto (2016) apabila menempatkan kebijakan sebagai pertarungan wacana, maka artinya kebijakan merupakan perebutan hegemoni antara dua atau lebih kelompok.

Munculnya pertarungan wacana tidak terlepas dari aspek sejarah yang menyertainya. Sejarah membentuk bagaimana perilaku yang dilakukan oleh kelompok di masa sekarang, perilaku tersebut dibentuk atas dasar kemenangan terhadap sebuah pengetahuan. Pengetahuan merupakan sebuah hal yang mampu diterima oleh banyak kalangan dan dianggap sebagai kebenaran objektif. Meskipun pada kenyataannya pengetahuan merupakan sebuah hal yang sengaja dibentuk dan terikat oleh relasi kuasa, bukan hal yang datang dari langit. Suatu kekuasaan perlu memproduksi sebuah pengetahuan untuk dapat terus berkuasa, ini juga dilakukan oleh negara-negara di era modern.

Negara di zaman pra modern lebih banyak menggunakan kekerasan langsung untuk dapat memproduksi kebenaran. Siapapun yang mencoba untuk melawan kebenaran akan langsung dihilangkan dan dieksekusi. Tentunya cara tersebut dilakukan untuk memberikan peringatan kepada siapapun yang melakukan perlawanan terhadap pengetahuan yang diproduksi oleh negara akan mengalami nasib yang sama. Namun, di zaman modern dengan majunya perkembangan teknologi memungkinkan otoritas untuk memenangkan kebenaran tanpa melakukan kekerasan secara langsung. Menurut Foucault di dalam bukunya *Disciplin and Punish* (1975) menjelaskan terdapat tiga tahap yang dilakukan oleh negara dalam melakukan kekuasaan, yaitu teknologi, strategi, dan program kekuasaan. Tahap pertama adalah penemuan pengetahuan untuk praktik mempertahankan kekuasaan. Strategi merupakan tahapan untuk melakukan kontrol, mengatur, mendominasi, dan memahami pengetahuan. Yang terakhir adalah tahapan untuk mempertahankan kekuasaan.

Atas dasar pemahaman tersebut suatu kekuasaan bukanlah hal yang pasif, tetapi kekuasaan adalah ide yang harus terus diproduksi. Menurut Gustomy (2009) kekuasaan dapat dilihat dari berbagai praktik kekuasaan yang muncul bersama dengan pengetahuan yang dibuat dari ide, cerita, aturan, hukum, istilah, dan komentar. Jenis-jenis tersebut dibungkus menggunakan disiplin ilmu agar terlihat sebagai suatu hal yang objektif dan ilmiah. Melalui cara-cara tersebut kekuasaan akan mendominasi diri seseorang tanpa disadari, mereka tidak lagi menguasai diri seseorang melalui cara-cara fisik. Pengetahuan yang dibentuk oleh kekuasaan tersebut mengubah cara pikir, kesadaran, pikiran, hingga relasi kekuasaan. Sangat penting untuk memenangkan pengetahuan tersebut melalui pembangunan wacana. Apabila pengetahuan yang dibangun melalui wacana diterima dan dianggap sebagai hal yang objektif maka entitas yang dikuasai akan menyerahkan apa yang diminta oleh yang menguasai.

Rawa Pening adalah sebuah danau yang berada di Kabupaten Semarang, dengan luas 2.670 hektar Danau Rawa Pening meliputi empat kecamatan yaitu Kecamatan Bawen, Ambarawa, Tuntang, dan Banyubiru. Rawa Pening terkenal karena keindahan danauanya serta cerita rakyat yang melegenda. Menurut Indrayati dan Hikmah (2018) terbentuknya Danau Rawa Pening karena dilakukan pembangunan pertama dam yang dikembangkan di hulu Sungai Tuntang pada tahun 1912-1916, akibat dari pembangunan tersebut permukaan air naik sehingga Sungai Tuntang menjadi satu-satunya pintu keluar air. Danau Rawa Pening jika dilihat dari satelit terletak di cekungan

terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran serta hilir dari ketiga gunung tersebut. Danau Rawa Pening hanya memiliki kedalaman sekitar 5-8 meter, meskipun tergolong dangkal dibandingkan danau lainnya tetapi seperti yang dikatakan oleh Rahmawati, dkk (2023) Rawa Pening menjadi sumber Sungai Tuntang

Warga sekitar Rawa Pening memanfaatkan danau untuk kegiatan ekonomi seperti mencari ikan, bertani, dan juga kegiatan pariwisata. Saat ini Danau Rawa Pening mengalami beberapa permasalahan secara serius, permasalahan tersebut sangat merugikan warga sekitar yang menaruh hidupnya di Rawa Pening, permasalahan tersebut harus segera mungkin diatasi jika tidak permasalahan yang lebih besar akan melanda Rawa Pening. Beberapa permasalahan yang dialami oleh Danau Rawa Pening meliputi sedimentasi danau yang menyebabkan pendangkalan sungai, infansi ikan *red devil* sebabkan punahnya ikan endemik, dan juga pertumbuhan enceng gondok yang sulit untuk dikendalikan bahkan pertumbuhan enceng gondok di Rawa Pening hampir 70% tertutup enceng gondok dan volume air berkurang hingga 30%. Oleh karena itu Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Konferensi Nasional Danau Indonesia pada tahun 2009 merilis 15 danau dengan kondisi kritis yang salah satunya adalah Danau Rawa Pening, bahkan danau yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini menjadi salah satu danau super prioritas penanganan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disamping danau lain yaitu Danau Toba, Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Tempe, dan Danau Maninjau. Selanjutnya pada

Konferensi Nasional Danau Indonesia kedua di Semarang pada tahun 2011 meluncurkan program Gerakan Penyelamatan Danau, Danau Rawa Pening menjadi model percontohan bagi program ini. Pada tahun 2020 terbit Keputusan Menteri PUPR No.365/KPTS/M/2020 yang membahas dan mengatur revitalisasi Rawa Pening, salah satu bahasannya adalah penetapan patok sempadan di sekitar danau. Tentunya melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah wacana yang coba dibangun adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar Danau Rawa Pening.

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sebagai pemegang tanggung jawab untuk melakukan revitalisasi danau mengatakan bahwa proyek revitalisasi dilakukan untuk mengendalikan sedimentasi dan eceng gondok, dan menormalkan aliran danau, “Untuk 5 tahun ke depan masih ada kalau kita usulkan lagi, karena eceng gondok ‘kan endemik, berkembang terus” (RRI.co.id). Kepala BBWS juga mengatakan bahwa saat ini revitalisasi Danau Rawa Pening telah masuk ke dalam tahap lima, pada tahap ini akan dilakukan perluasan dan pengerukan eceng gondok untuk mengendalikan sedimentasi danau (Regional.espos.id). Artinya dari pemerintah ingin membentuk wacana bahwa revitalisasi Danau Rawa Pening dilakukan untuk menyelamatkan danau dengan dalih sedimentasi dan pengendalian eceng gondok. Sementara itu warga sekitar Danau Rawa Pening berpendapat sebaliknya, “Ini bukan revitalisasi, melainkan pemekaran Danau Rawa Pening, dikarenakan pemasangan patok yang masuk ke perkampungan” (Serat.id). Pada kenyataannya memang dilakukan pematokan untuk menetapkan batas

sempadan Danau Rawa Pening. Pematokan tersebut dilakukan hingga pada halaman rumah warga, hal tersebut yang menimbulkan gejolak karena warga khawatir jika tempat hidup mereka akan hilang karena proyek ini. Permasalahan tersebut beberapa kali dialami oleh warga sekitar Danau Rawa Pening. Pada tahun 2021 warga tidak bisa melakukan proses bertani karena pintu air Tuntang tidak dibuka. Hingga menyebabkan kerugian pada warga yang mata pencaharian sehari-harinya sebagai petani (Kompas.id).

Menurut Amalia, dkk (2023) revitalisasi danau adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui beberapa kegiatan yang bersifat struktural maupun non struktural. Menurut Gobel & Koton, 2017; Mahmud dkk., 2020; Suawa et dkk., 2021 dalam (Amali, 2023) nantinya revitalisasi danau disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap danau, bentuk dari revitalisasi bisa berupa pengerukan danau, pembersihan tanaman invasif, pembuatan tanggul, dan perencanaan penggunaan lahan di daerah aliran sungai.

Dalam pelaksanaannya revitalisasi Danau Rawa Pening mengalami perlawanan yang dilakukan oleh warga, warga tersebut berkumpul di dalam kelompok-kelompok kecil yang didasarkan pada kesamaan profesi ataupun hanya sekedar senasib sepenanggungan dalam mempertahankan Danau Rawa Pening. Efek dari revitalisasi ini secara langsung dirasakan oleh warga sekitar seperti tenggelamnya sawah milik warga hingga warga yang tidak diperbolehkan lagi mendirikan keramba di tengah danau. Warga mulai membangun kekuatan yang dimulai dari warga terdampak itu sendiri hingga

meminta bantuan kepada lembaga non pemerintahan serta mahasiswa untuk membersamai gerakan mereka. Puncaknya adalah ketika Balai Besar Wilayah Sungai bersama dengan TNI Angkatan Darat memasang patok sempadan yang merupakan batas pinggir dari revitalisasi Danau Rawa Pening ke rumah-rumah warga tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Warga marah karena patok ditanam hingga ke pekarangan rumah warga bahkan belakang rumah warga, yang artinya rumah warga yang masuk ke dalam area patok sempadan nantinya akan terkena proyek revitalisasi Danau Rawa Pening nantinya. Dengan kata lain warga yang sudah puluhan tahun tinggal di sekitar Danau Rawa Pening dipaksa untuk mengalah dan pindah hanya demi Proyek Strategis Nasional. Hal yang sama juga terjadi di tempat lain yaitu revitalisasi Danau Tempe yang berada di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Danau Tempe juga masuk ke dalam 15 danau kritis yang harus segera diselamatkan oleh Kementerian PUPR, hal tersebut terjadi karena pendangkalan dan pertumbuhan eceng gondok. Menurut Darti, Bariroh, dan Herman (2022) masyarakat sekitar Danau Tempe juga melakukan protes terhadap revitalisasi karena mereka berpandangan bahwa revitalisasi yang dilakukan akan berimplikasi pada mata pencaharian mereka.

Aksi kolektif warga mencoba membangun wacana tandingan dari wacana yang diberikan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Melalui berbagai cara seperti memberikan surat secara langsung kepada pemerintah baik daerah ataupun pusat hingga mengadakan diskusi melalui lembaga non pemerintahan hingga mahasiswa. Wacana yang hendak dikeluarkan oleh warga

adalah mereka tidak menolak adanya revitalisasi ini, tetapi jangan sampai mengorbankan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka di Danau Rawa Pening.

Gerakan sosial sendiri menurut Zurcher dan Snow (1999) memberikan definisi dari gerakan sosial sebagai kegiatan yang bersifat kolektif dengan kebebasan ekspresi yang didasarkan kepada kepedulian yang tinggi terhadap beberapa isu. Gerakan sosial muncul karena sangat cepat sekali perubahan sosial yang terjadi dan bergerak secara terus menerus hingga menciptakan beragam kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Antara kelompok satu dengan kelompok lainnya memiliki tujuan yang berbeda sehingga menimbulkan gesekan antar kelompok. Oleh karena itu menurut Haris, dkk (2019) jika suatu masyarakat semakin maju, heterogen, dan modern semakin terbuka juga untuk terciptanya gerakan sosial. Ada juga teori gerakan sosial baru oleh pemikir post marxisme seperti Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, Mahisa, dkk (2020) mengatakan teori ini berfokus pada bentuk perlawanan atas bentuk penindasan yang terjadi pada masyarakat kapitalis tahap lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah yang mencoba membuat sebuah wacana kesejahteraan untuk memuluskan revitalisasi Danau Rawa Pening mendapatkan hadangan dari warga yang membuat wacana tandingan dikarenakan tempat tinggal mereka terancam digusur karena proyek revitalisasi. Kondisi ini memunculkan dinamika antara warga yang dibantu oleh lembaga non pemerintahan dan mahasiswa dengan pemerintah. Bahkan

warga membentuk aksi kolektif untuk memberikan wacana tandingan kepada pemerintah. Perebutan makna wacana antara kedua belah pihak tentunya bukan menjadi hal yang mudah, berbagai cara baik melalui media apapun itu dilakukan oleh kedua pihak agar memenangkan makna wacana dari revitalisasi Danau Rawa Pening ini. Apabila suatu saat di antara kedua belah pihak yang berhasil memenangkan makna wacana maka akan lebih mudah kepentingan mereka dapat terpenuhi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perebutan wacana antara pemerintah yang bertanggung jawab terkait revitalisasi danau Rawa Pening dengan warga sekitar Danau Rawa Pening. Ardianto (2016) pada bukunya yang berjudul “Mitos Tambang untuk kesejahteraan: pertarungan wacana kesejahteraan dalam kebijakan pertambangan” menggunakan analisis wacana untuk menunjukkan bahwa janji kesejahteraan penuh dengan kepentingan politik. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, meskipun memiliki kesamaan dalam menggunakan analisis wacana. Namun, objek penelitiannya berbeda, penulis akan berfokus kepada proyek revitalisasi Danau Rawa Pening, serta meneliti pertarungan wacana antara pihak dominan dengan pihak tandingan. Menurut Darti, B. S., & Herman, S. R. W. (2022) penolakan juga terjadi pada revitalisasi Danau Tempe di Kabupaten Wajo. Menurut penelitian mereka, penolakan warga dikarenakan tempat hidup mereka terancam karena proyek revitalisasi Danau Rawa Pening. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada analisis yang digunakan, penulis menggunakan analisis wacana terhadap

proyek revitalisasi Danau Rawa Pening. Indrayati, A., & Hikmah, N. I. (2018) lebih spesifik melakukan penelitian terkait sedimentasi yang akan terjadi di Danau Rawa Pening. Penelitian tersebut menjabarkan penyebab terjadinya pendangkalan Danau Rawa Pening sejak tahun 2020. Penelitian yang dilakukan Barasa, M. S., & Riyanto, F. A. (2023) membahas tentang hubungan kekuasaan, pengetahuan, dan peran media. Media diyakini sebagai instrumen yang memungkinkan terjadinya monopoli pengetahuan sekaligus budaya yang diwajarkan oleh masyarakat. Perbedaan penelitian terletak pada fokus objek kajiannya. Menurut Nofrima dan Qodir (2021) gerakan sosial baru yang dilakukan pada Gejayan Memanggil 2019 di Yogyakarta tidak berdasarkan basis ideologi tertentu. Namun, gerakan tersebut fokus kepada tujuan bersama yang ingin dicapai. Penulis juga akan menggunakan gerakan sosial baru pada penelitian kali ini, tetapi objeknya bukan Gejayan Memanggil melainkan revitalisasi Danau Rawa Pening.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembentukan wacana antara warga sekitar Danau Rawa Pening dengan pemerintah dalam revitalisasi Danau Rawa Pening?
2. Bagaimana proses pertarungan wacana antara warga sekitar Danau Rawa Pening dengan pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perebutan makna wacana yang dibangun oleh warga Danau Rawa Pening untuk mempertahankan ruang hidup mereka dan wacana yang dibangun oleh pemerintah untuk meneruskan

proyek revitalisasi Danau Rawa Pening baik yang berada di media atau secara langsung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian tentang konflik revitalisasi Danau Rawa Pening yang masih jarang, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat menambah pengetahuan sebagai dasar untuk memahami kondisi masyarakat akar rumput yang terkena revitalisasi Danau Rawa Pening. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini pemerintah dapat menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menjalankan proyek strategis ini.

2. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengalaman bagi peneliti sendiri. Di lain sisi peneliti juga berharap penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan wawasan bagi peneliti untuk terus berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan bagi pembaca terkait kajian ilmu pemerintahan utamanya pada politik wacana dalam suatu konflik antara warga dan pemerintah. Selain itu peneliti juga berharap penelitian ini dapat berguna untuk acuan bagi peneliti selanjutnya, utamanya peneliti Ilmu Sosial dan Ilmu Politik apabila di esok hari melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Wacana

Menurut KBBI wacana adalah sebuah satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh, seperti novel, buku, artikel, pidato, atau khutbah. Silaswati (2019) berpendapat bahwa wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan hingga membentuk makna serasi di antara kalimat-kalimat tersebut. Wacana dipahami sebagai sebuah alat untuk berkomunikasi dalam interaksi sosial, interaksi tersebut terjalin baik antara individu dan individu, individu dan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Komunikasi memiliki dua jenis yaitu komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi verbal berarti menggunakan lisan atau tulisan sedangkan nonverbal menggunakan isyarat atau kinestik. Dalam cara berkomunikasi yang digunakan adalah komunikasi verbal. Sudaryat dalam Silaswati (2019) menjelaskan bahwa dalam wacana diasumsikan terdapat penyapa yaitu pembicara atau penulis dan pesapa yaitu pendengar atau pembaca, dalam hal wacana penyapa menyampaikan pesan berupa pikiran, rasa, atau kehendak menjadi makna dalam bahasa untuk disampaikan kepada pesapa sebagai amanat.

Michael Foucault salah satu pemikir terbesar wacana memberikan pandangannya yang dipengaruhi oleh pemikir seperti Marx, Nietzsche tentang wacana. Di dalam pemikirannya Foucault mencoba menjawab bagaimana wacana diproduksi, siapa yang memproduksi, dan apa yang diproduksi oleh wacana. Siregar (2021) dalam jurnalnya

mengatakan bahwa wacana memiliki banyak segala sesuatu di dalamnya seperti segala sesuatu yang ditulis, dikatakan, dikomunikasikan dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Wacana dalam pandangan Foucault memiliki pengertian untuk bahwa di dalam wacana terkandung sebuah makna, nilai, dan pengetahuan akan sesuatu. Foucault dalam Siregar (2021) menjelaskan bahwa semua wacana dihasilkan oleh kekuasaan tetapi wacana bukan bawahan kekuasaan. Sehingga wacana merupakan sebuah cara untuk memudahkan kekuasaan terus berjalan, wacana juga sering digunakan di dalam setiap keputusan politik. Suatu hal yang perlu dipahami adalah wacana tidak bersifat tunggal tetapi beragam tergantung dari kepentingan penguasa.

Foucault menjelaskan bahwa pengetahuan, wacana dengan kekuasaan memiliki hubungan yang erat. Kekuasaan yang menjadi perhatian Foucault berada pada bagaimana mekanisme dan mempraktikkan sehingga diterima dan dianggap menjadi kebenaran oleh masyarakat umum. Sehingga di dalam kekuasaan tidak lepas dari pengetahuan, begitu juga sebaliknya tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan. Dengan kata lain Foucault mengamini pemikiran postmodernisme tentang ilmu pengetahuan yang bersifat intersubjektif, artinya suatu teori hanya diakui oleh ilmuwan yang memang memiliki kepentingan yang sama. Dari pemikiran kaum postmodernisme Foucault mengatakan bahwa saat ini ilmu pengetahuan bukan lagi tentang

menjawab benar atau salah tetapi apakah ilmu pengetahuan tersebut berguna atau bermanfaat. Siregar (2021) menjelaskan bahwa Foucault memandang ilmu pengetahuan berhubungan dengan kekuasaan.

Wacana merupakan sebuah permainan kebenaran yang bisa dimainkan oleh siapapun, tetapi pada umumnya wacana dimenangkan oleh kelas yang memiliki sumber daya lebih banyak. Sebuah wacana bisa muncul kapanpun dan hilang kapanpun tergantung dari yang memainkan wacana, wacana juga bukanlah sebuah kebenaran yang mutlak. Bisa saja suatu wacana dibangun untuk mengaburkan kebenaran yang sebenarnya. Dalam Siregar (2021) diberikan contoh tentang wacana oleh suatu kelas yang diamini kebenarannya oleh masyarakat luas yaitu Amerika Serikat yang meyakinkan sekutunya untuk menghancurkan Irak dengan cara membuat sebuah wacana jika Irak memiliki senjata pemusnah massal. Foucault juga berpandangan jika kekuasaan hanya bisa diaplikasikan pada ruang dan waktu tertentu, kekuasaan juga tidak bisa diperoleh, tidak dibagi, tidak ditambah atau dikurangi sama sekali.

Dalam penerapannya wacana diproduksi untuk menjadi sebuah pengetahuan umum yang dinikmati oleh publik. Bangunan wacana yang dibangun oleh sekelompok kelas membatasi pandangan publik terhadap sesuatu di luarnya. Oleh karena itu dalam menerima realitas yang ada masyarakat sering kali menerima sebuah wacana yang dimenangkan oleh salah satu kelas. Pembentukan wacana di era modern dapat beragam bentuknya. Pertama, berbentuk iklan di media, Apriliyadi (2021)

menjelaskan bahwa iklan dibuat untuk mengarahkan pembaca kepada wacana yang telah ditentukan oleh pembuat iklan, sehingga pandangan kita mengenai sebuah produk sesuai dengan apa yang pembuat iklan inginkan. Kedua, wacana juga bisa dibangun melalui instansi pemerintahan, hal tersebut dijalankan dengan membuat sebuah kebijakan yang didasarkan kepada kebenaran pengetahuan menurut pembuat wacana, seperti pada kasus Covid-19 yang beberapa kali kebijakannya berubah-ubah. Ketiga, wacana dibangun melalui pengetahuan dan ilmu pengetahuan, artinya suatu pengetahuan memiliki hubungan dengan kekuasaan.

1.5.2 Gerakan Sosial Baru

Dalam tubuh masyarakat terdapat banyak sekali dinamika yang terjadi. Dinamika tersebut terkadang memiliki kepentingan yang berbeda satu pihak dengan pihak lainnya. Kepentingan yang berbeda tersebut membawa kepada gesekan kepentingan hingga menuju konflik. Konflik merupakan sebuah hal yang pasti terjadi di dalam masyarakat. Dahrendorf (1959) menjelaskan bahwa otoritas di manapun selalu memiliki relasi untuk selalu berkuasa dan menguasai. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak meratanya distribusi hubungan di antara relasi sosial hingga menjadi sumber dasar konflik sosial. Lebih lanjut Dahrendorf menjelaskan bahwa masyarakat terbagi menjadi dua sisi, yaitu integrasi dan konflik. Dalam sisi integrasi terdapat kesepakatan, norma, dan nilai bersama, sedangkan sisi konflik memiliki

pertentangan kepentingan, dominasi, dan perlawanan. Dia percaya bahwa masyarakat tidak hanya bisa dipahami dari sisi harmoni saja, tetapi juga dari sudut konflik yang sejak dulu telah menjadi bagian yang pasti dari kehidupan sosial.

Relasi otoritas menjadi bagian awal dari munculnya konflik, seperti yang telah disinggung sebelumnya. Otoritas disebut sebagai sumber konflik karena pada setiap strukturnya memiliki posisi yang superior dan posisi inferior. Posisi superior merupakan posisi yang memiliki sumber daya untuk memerintah sedangkan posisi inferior merupakan posisi yang diperintah. Adanya relasi semacam ini sangat rawan terjadinya konflik, ditambah struktur superior biasanya tidak menyalurkan dengan baik apa yang seharusnya menjadi hak struktur inferior. Kejadian semacam ini tidak hanya terjadi pada bidang ekonomi saja seperti yang diyakini oleh Marx. Namun, juga terjadi pada bidang politik, birokrasi, pendidikan, hingga struktur terkecil yaitu keluarga. Perlu menjadi perhatian juga, konflik tidak hanya menjadi perusak dari sebuah struktur masyarakat yang sedang bermaksud, pada kondisi tertentu konflik menjadi sebuah perubahan sosial ataupun gerakan sosial.

Apabila berbagai situasi ketimpangan tetap dijalankan dan dipertahankan oleh otoritas, maka akan terbentuk sebuah perlawanan hingga pemberontakan pada sistem tersebut. Pemberontakan atau perlawanan tersebut memperjuangkan kesetaraan, keadilan sosial, dan

mencerminkan perjuangan identitas masyarakat kepada sistem yang menindas mereka. Situasi tersebut adalah sebuah kepastian, karena situasi tersebut biasa disebut juga dengan konflik. Pada pembacaan sejarah gerakan penentangan seperti ini bukanlah sesuatu yang kebetulan terjadi, tetapi sesuatu yang sudah pasti terjadi. Sebut saja gerakan buruh industri pada abad ke 19 yang menuntut keadilan dalam upah dan jam kerja. Pada saat itu terjadi penindasan kepada buruh dengan bentuk yang mengharuskan buruh bekerja selama 12-16 jam sehari dengan upah yang sangat rendah serta tanpa jaminan apapun. Karena adanya sistem atau otoritas yang menindas maka buruh melakukan perlawanan dan pertentangan dengan cara mogok kerja dan demonstrasi. Akhirnya buruh mendapatkan keadilan berupa penetapan jam kerja selama delapan jam dalam sehari serta jaminan upah yang layak. Konsep yang diperjuangkan oleh buruh pada abad ke 19 masih digunakan hingga pada saat ini.

Adanya distribusi yang tidak adil dari pendistribusi ke yang menerima distribusi rawan terjadinya konflik. Konflik tersebutlah yang juga akan menimbulkan gerakan sosial. Namun, gerakan sosial sendiri memiliki pendefinisian yang berbeda, tak jarang juga gerakan sosial dikaitkan dengan aksi kolektif lain yang sebenarnya berbeda secara konsep dan cara Bergeraknya. Singh (2010) melakukan analisis kepada beberapa bentuk gerakan kolektif untuk bisa membedakan semua hal tersebut, Singh menyebutkan beberapa jenis seperti kerusuhan (*riot*),

pemberontakan (*revolt*), dan penentangan (*rebellion*). Singh menganggap bahwa kerusuhan pecah secara tiba-tiba yang melontarkan kemarahan kepada sasaran dengan membabi buta dengan waktu yang singkat setelah terjadinya kematian dan kehancuran. Pada lain sisi pemberontakan merujuk pada aksi penentangan terhadap sasaran yang lebih terorganisir, lebih lanjut pemberontakan bisa juga berupa aksi peruntuhan kepada sasaran yang lebih terorganisir. Sementara itu penentangan merupakan penolakan dan pemberontakan kepada otoritas. Semua hal tersebut berbeda dari gerakan sosial yang dimaksud oleh Rajendra Singh, tetapi terdapat garis merah antara semua gerakan kolektif tersebut dengan gerakan sosial.

Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang tidak selalu menggunakan kekerasan, model ini juga hanya melibatkan beberapa anggota masyarakat saja untuk memulainya. Berbeda dengan berbagai aksi kolektif yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa gerakan tersebut memerlukan seluruh elemen hingga menggunakan kekerasan untuk memulainya. Lebih lanjut gerakan sosial memobilisasi partisipannya untuk menyuarakan sebuah permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Gerakan sosial juga cenderung memiliki umur yang panjang, karena aksi ini dimulai secara terorganisir dan terstruktur, tidak juga seperti aksi kolektif lainnya yang cenderung terjadi secara tiba-tiba. Singh (2010) secara khusus merumuskan sebuah ciri gerakan sosial,

model ini memiliki sebuah ideologi, strategi, struktur, organisasi, lawan, mobilisasi, dan dampak yang disepakati bersama oleh partisipannya. Beberapa variabel tersebut diyakini dan dijalankan bersama oleh partisipannya.

Dalam perkembangannya gerakan sosial mengalami banyak sekali pembaharuan. Pada era awal, studi gerakan sosial banyak terinspirasi oleh studi *crowd* (kerumunan), secara umum *crowd* dibedakan menjadi dua, yaitu *crowd* aktif dan *crowd* pasif. Namun, pada studi ini *crowd* aktiflah yang dilakukan penelitian karena *crowd* pasif digambarkan hanyalah sebuah sekumpulan orang yang tidak memiliki tujuan jelas, seperti sekumpulan orang yang sedang menyaksikan kebakaran. Salah satu tokoh yang membahas *crowd* adalah Le Bon, dalam studinya ia percaya ketika seseorang individu bergabung ke dalam kerumunan akan terdapat perubahan psikologis pada dirinya. Le Bon (2003) mengatakan bahwa individu dalam kerumunan akan kehilangan identitas, kemauan, dan penilaian pribadi mereka. Dijelaskan olehnya hal tersebut terjadi karena individu tersebut melebur menjadi satu ke dalam sebuah massa hingga identitas mereka tidak lagi diketahui atau menjadi anonim.

Atas dasar studi tersebut gerakan sosial klasik memiliki ciri khas yang berbeda dengan gerakan sosial baru. Pada gerakan sosial klasik masih terdapat basis kelas—seperti kelas pekerja, kelas buruh, hingga kelas petani—yang memperjuangkan suatu hal untuk kepentingan

mereka saja. Model klasik ini juga berorientasi kepada ekonomi dan politik, seperti perjuangan untuk mendapatkan upah yang adil, kondisi kerja yang lebih baik, hingga hak-hak politik untuk kelas mereka. Dengan kata lain gerakan sosial klasik fokus kepada hal-hal material, karena memang menurut Quraisy (2019) paradigma yang digunakan pada model ini adalah teori Marxis.

Pada sisi lain pada model gerakan sosial baru paradigma material oleh Marx ditinggalkan secara total. Gerakan sosial baru tidak lagi berbicara tentang satu kelas kelas saja atau konflik kelas, tetapi mereka berjuang dengan lintas kelas. Singh (2010) lebih lanjut menjelaskan bahwa gerakan sosial baru tidak menjadikan kelas sebagai satu-satunya perjuangan, isu yang menjadi perhatian lebih beragam seperti lingkungan hingga demokrasi. Hal ini dikarenakan campur tangan negara tidak hanya terbatas pada ekonomi saja. Negara di era *post-modern* memegang kendali penuh pada setiap lini kehidupan manusia yang menjadikan mereka mengetahui segala informasi, nantinya informasi tersebut digunakan sebagai alat kontrol. Itulah yang menyebabkan konflik di era sekarang tidak hanya terbatas pada satu kelas saja, konflik-konflik tersebut telah meluas melewati batasan sosial yang didasarkan atas kelas. Oleh karena itu gerakan sosial baru tidak terjebak pada permasalahan ekonomi politik suatu negara saja, tetapi mereka berbicara tentang keberadaan dasar manusia tanpa memandang kelas sosial. Gerakan sosial baru yang tidak lagi

menggunakan paradigma kelas sosial menjadikan mereka juga tidak menggunakan konsep serikat untuk bergerak. Alih-alih menggunakan serikat menurut Singh (2010) gerakan sosial baru memilih memberdayakan politik akar rumput, aksi politik akar rumput, membahas isu lokal, dan menggerakkan kelompok masyarakat kecil.

Berdasarkan hal tersebut banyak dijumpai gerakan sosial baru memperjuangkan isu non material hingga isu yang memiliki basis identitas dan nilai. Isu seperti feminisme, ekologi, kebudayaan, anti perang, hingga anti nuklir adalah sebuah isu yang diperjuangkan oleh model gerakan ini. Lebih mendasar lagi gerakan sosial baru juga menanggapi persoalan planet tempat manusia tinggal. Pada isu tersebut tidak ada konflik kelas dan kepentingan material yang melatar belakangnya serta perjuangan yang dibangun melewati batasan negara, kebudayaan, dan politik.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah operasionalisasi konsep yang nantinya akan menjelaskan bagaimana variabel-variabel dalam sebuah penelitian diukur dan dijalankan. Operasionalisasi konsep adalah sebuah alat untuk menggambarkan suatu konsep yang masih abstrak ke dalam sesuatu yang dapat diukur atau diamati secara langsung. Pada penelitian kali ini operasionalisasi konsepnya menggunakan teori wacana dan gerakan sosial baru. Wacana oleh Foucault menegaskan bahwa pengetahuan yang diyakini bersama tidaklah alami terbentuk, tetapi sengaja dibentuk oleh kekuasaan untuk kepentingan tertentu. Sementara itu gerakan sosial baru menurut

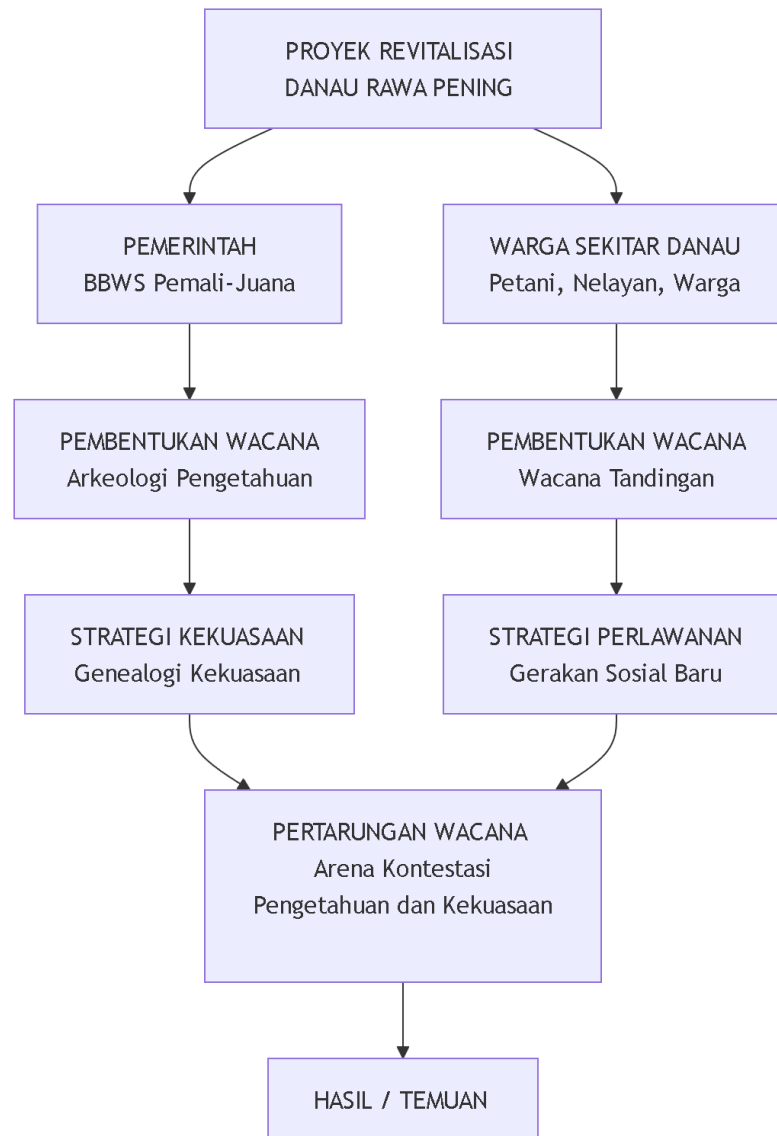
Rajendra Singh adalah gerakan yang tidak hanya berdasarkan basis kelas saja, tetapi juga memperjuangkan isu-isu seperti lingkungan hingga kebebasan berekspresi.

Tabel 1. 1 Operasional Konsep

Konsep/Teori	Indikator	Sub-Indikator
Wacana Foucauldian	Arkeologi	<ul style="list-style-type: none"> - Penggalan sejarah tentang revitalisasi Danau Rawa Pening. - Penyematan kata “sakit” pada Danau Rawa Pening. - Proses membangun pengetahuan untuk kebenaran.
	Genealogi	<ul style="list-style-type: none"> - Patahan sejarah terkait perubahan perlakuan pemerintah kepada Danau Rawa Pening. - Penggunaan kekuatan negara sebagai pendisiplinan tubuh.
	Wacana Tandingan	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun pengetahuan alternatif sebagai bentuk wacana tandingan melalui gerakan sosial - Modal Sosial yang digunakan dalam gerakan sosial. - Bentuk gerakan yang dilakukan oleh warga sekitar Danau Rawa Pening.

1.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian analisis wacana yang dilakukan di daerah sekitar Danau Rawa Pening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam sehingga bisa memahami konstruksi makna dalam konteks sosial, politik, dan kultural. Penggunaan analisis wacana digunakan dalam penelitian ini karena revitalisasi Danau Rawa Pening tidak hanya karena motif penyelamatan danau saja, tetapi juga ada permasalahan sosial, kepentingan, hingga kultural yang ditunjukkan melalui bahasa dan representasi.

Eriyanto (2001) mengatakan bahwa analisis wacana adalah alat untuk mengetahui bahwa bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi. Namun, bahasa juga sebagai alat praktik sosial yang di dalamnya penuh dengan ideologi, kekuasaan, dan kepentingan tertentu. Artinya dalam analisis wacana sebuah bahasa atau simbol yang ditunjukkan tidak bermakna kosong. Bahasa memiliki makna yang diselipkan di dalamnya, makna tersebut bisa berupa ideologi, kekuasaan, hingga kepentingan. Dengan menggunakan analisis wacana, peneliti dapat mengungkap pemaknaan revitalisasi dari dua pihak yaitu pemerintah dan warga sekitar danau rawa pening.

Media massa sering kali menjadi arena dalam perebutan wacana. Dari sisi pemerintah—aktor dominan—media dapat digunakan untuk mengabarkan dan menggambarkan bahwa proyek revitalisasi Danau Rawa Pening akan membawa kebaikan untuk banyak orang. Pada sisi lain dari pihak tandingan yaitu warga sekitar Danau Rawa Pening menggunakan media untuk melakukan perebutan makna wacana

terhadap wacana yang dibangun oleh aktor dominan. Media juga dapat membentuk realitas sosial melalui praktik representasi. Dengan dasar tersebut, akan dilakukan analisis terhadap teks-teks media untuk memahami bagaimana proses perebutan makna wacana antara kedua pihak tersebut.

Analisis tidak hanya dilakukan di media konvensional saja, tetapi juga dilakukan pada kanal digital seperti YouTube. Media digital seperti YouTube mampu menggabungkan audio dan visual, sehingga akan lebih mudah diterima oleh banyak kalangan. Media YouTube kerap digunakan oleh aktor dominan dan juga aktor tandingan untuk memenangkan wacana dengan membuat berbagai konten yang mengedepankan wacana yang ingin mereka menangkan. Dalam konten tersebut, aktor akan mengedepankan klaim mereka terhadap proyek revitalisasi Danau Rawa Pening baik melalui narasi akademisi, pengalaman secara langsung, hingga ruang aktivis.

Menurut Pahleviannur (2022) penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individual atau kelompok. Lebih jelasnya lagi penelitian kali ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang artinya memberikan penjelasan terhadap apa yang menjadi temuan peneliti tanpa adanya manipulasi data. Penelitian kualitatif sendiri terdiri dari tiga hal pokok yaitu respons awal, proses konstruksi, dan penyimpulan. Penalaran yang dilakukan pada penelitian

kualitatif adalah induktif yang berawal dari data lalu dilakukan generalisasi empiris untuk menarik kesimpulan.

1.8.2 Situs Penelitian

Peneliti nantinya akan melakukan penelitian untuk mencari data dan informasi di daerah sekitar Danau Rawa Pening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan BBWS Pemali-Juana. Selain itu akan dilakukan analisis di ruang media yang membahas proyek revitalisasi Danau Rawa Pening. Rentang kejadian penelitian akan dilakukan sepanjang tahun 2020-2025.

1.8.3 Subjek Penelitian

Untuk mempermudah penelitian diperlukan data-data yang akan diperoleh dari berbagai sumber. Oleh karena itu subjek penelitian kali ini adalah:

- Tokoh masyarakat sekitar Danau Rawa Pening
- Warga sekitar Danau Rawa Pening
- Kepala Balai BBWS Pemali-Juana
- Direktur LBH Semarang
- Media arus utama (berita online hingga cetak)
- Media sosial

1.8.4 Jenis Data

Dikarenakan peneliti menggunakan penelitian kualitatif maka jenis data yang akan digunakan adalah data yang berupa teks, kata-kata

tertulis, frasa atau simbol yang nantinya menggambarkan suatu kondisi, tindakan, ataupun manusia di dalam kehidupan sosial.

1.8.5 Sumber Data

Data di dalam penelitian ini nantinya terdapat dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh penulis dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber seperti melakukan wawancara dengan warga sekitar Danau Rawa Pening, BBWS Pemali-Juana, dan LBH Semarang. Sementara itu data sekunder nantinya akan diperoleh dari sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, media offline atau online, dan penelitian terdahulu.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini nantinya akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- Pengamatan. Dengan teknik pengumpulan data berupa pengamatan penulis dapat mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung objek yang ingin diteliti. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait segala hal tentang objek yang diteliti secara langsung, selain itu teknik pengamatan juga dapat mendapatkan fakta lapangan secara langsung.
- Wawancara mendalam. Wawancara mendalam dipahami sebagai sebuah teknik pengumpulan data yang berupa percakapan secara langsung antara peneliti dengan narasumber. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan informasi yang rinci tentang topik yang

ingin diteliti. Dengan menggunakan wawancara mendalam peneliti akan mendapatkan pengalaman, pandangan, dan Interpretasi narasumber secara detail terkait topik yang diteliti.

- Dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan data dari dokumen tertulis yang sudah ada sebelumnya, dokumentasi tertulis tersebut berupa buku atau semacamnya untuk keperluan penelitian. Dengan teknik ini penulis dapat mengakses data historis, administratif, dan pandangan yang dapat memberikan pemahaman mendalam serta validasi bagi penulis. Nantinya penulis akan melalui beberapa tahapan di dalam teknik ini. Pertama, mengidentifikasi dokumen yang relevan dengan penelitian. Kedua, pengumpulan dokumen melalui berbagai sumber baik dari perpustakaan, arsip nasional, website, organisasi, ataupun media umum. Ketiga, pengelompokan dokumen berdasarkan topik yang relevan satu sama lain, nantinya penulis juga akan membuat daftar dokumen untuk memudahkan pencarian. Keempat, menganalisis dokumen dengan cara membaca dan memahami dokumen, selain itu juga dengan menggunakan analisis konten untuk memahami tema, pola, serta hubungan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, maka dari itu pengolahan data yang digunakan adalah pengolahan data induktif. Pengolahan data induktif adalah sebuah

pendekatan yang diperoleh dengan cara menarik sesuatu yang khusus dari data umum. Langkah di dalam pengelolaan data ini adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dalam analisis data kualitatif dengan tujuan untuk menyederhanakan, memfokuskan, dan mentransformasikan data yang telah terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar lebih tertata, mudah dipahami, dan dapat dikelola.

2. Penyajian Data

Di tahap ini berfungsi untuk mengelompokkan, meringkas, dan menampilkan data yang telah direduksi sehingga dapat dianalisis lebih mendalam. Tahap ini sangat penting karena dengan penyajian data dapat membantu peneliti untuk memahami pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari proses analisis. Tahapan ini diperoleh dari tahapan sebelumnya yang melibatkan identifikasi pola, tema, dan hubungan dalam data yang telah dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengidentifikasi pola dan tema, menyusun pengelompokan, dan menjelaskan temuan dari penelitian.

1.8.8 Kualitas Data

Untuk menjamin data yang diperoleh oleh peneliti maka diperlukan suatu analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis *historical situatedness*, yang dimaksud dengan *historical situatedness* adalah sebuah pendekatan yang memperhatikan konteks sejarah tentang data yang dikumpulkan dan diinterpretasikan. Adanya analisis ini membuktikan bahwa data yang tidak dapat dipisahkan dari waktu, tempat, dan situasi sosial dan politik yang mempengaruhi fenomena tersebut.

Pada penelitian ini juga menggunakan triangulasi untuk menjaga kualitas data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Sa'adah, Rahmayati, & Prasetyo (2022) mengatakan bahwa triangulasi berguna untuk mengecek kebenaran data dengan cara memberikan perbandingan data yang telah diperoleh secara langsung dengan sumber lain di berbagai tahap penelitian lapangan.